



Risalah Autentik

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI I DPR RI  
DENGAN PAKAR/AKADEMISI**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 6 (enam)  
Jenis Rapat : RDPU  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024  
Waktu : 13.00 s.d. 14.59 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sugiono (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-P.Gerindra)
- Acara : Mendapatkan masukan terhadap:
1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Française relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défense*);
  2. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*);
  3. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*); dan
  4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)

Daftar Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**  
13 orang hadir dari 50 orang Anggota dengan rincian:

**1. PIMPINAN:**

1. Meutya Viada Hafid
2. Sugiono

**2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

4 orang hadir dari 11 orang Anggota

1. Junico BP Siahaan, S.E.
2. Andika Hasan
3. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
4. Drs. Mukhlis Basri

**3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

2 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Tofan Maulana

**4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

3 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Ir. Irwan Ardi Hasman
2. Ali Imron Bafadal

**5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

0 orang hadir dari 4 orang Anggota

-

**6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
2. Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, MP.
3. H. Andi Najmi Fuaidi, S.H.

**7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

0 orang hadir dari 5 orang Anggota

-

**8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

0 orang hadir dari 5 orang Anggota

-

**9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.

**10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

-

**B. UNDANGAN**

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D. (Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional UKI)
2. Muhamad Haripin, Ph.D. (Kajian Keamanan dan Konflik di Pusat Penelitian Politik BRIN)
3. Curie Maharani Savitri, Ph.D. (Doseb Hubungan Internasional Universitas BINUS)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

Baik, Bapak-Bapak, Ibu bisa kita mulai?

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita sekalian,  
*Shalom,*  
*Om Swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam Kebajikan,

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,**

**Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Angel Damayanti, Ph.D. Guru Besar Ilmu Keamanan Internasional UKI,**

**Kemudian Bapak Muhamad Haripin, Ph.D, dari Kajian Keamanan dan Konflik di Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),**

**Kemudian, Ibu Curie Maharani Savitri, Ph.D. Dosen Hubungan Internasional Universitas Binus,**

**Serta, Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI pada rapat RDPU pada sore hari ini, Selasa, 26 Maret 2024,**

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat hari ini telah dihadiri oleh 10 Anggota yang hadir secara fisik, mewakili 4 Fraksi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka kuorum rapat sore hari ini, terpenuhi.

Kemudian, sebagaimana amanat Pasal 276 ayat (1), Pasal 282 ayat (2)..., *eh* ayat (1) Tata Tertib, kita sepakati rapat sore hari ini dilaksanakan secara terbuka. Setuju?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)**

**Bapak-Ibu yang saya hormati,**

Dapat kami sampaikan bahwa Komisi I DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk membahas empat rancangan undang-undang, yaitu pertama adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang kerja sama di bidang pertahanan. Kemudian RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai kerja sama di bidang pertahanan. Kemudian yang ketiga, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerja sama di bidang pertahanan. Dan yang keempat, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brazil tentang kerja sama terkait pertahanan.

Sebelum pembahasan empat RUU tersebut, Komisi I DPR RI ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Ibu para pakar, sebagai narasumber terhadap empat rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang Profesor Angel, Bapak Muhamad Haripin, dan Ibu Curie Maharani Savitri pada sore hari ini untuk menyampaikan masukan dan penjelasannya terkait RUU di maksud kepada Komisi I.

Untuk mempersingkat waktu kami silakan kepada..., mungkin pertama yang terhormat dari Profesor Angel terlebih dahulu untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

Waktu dan tempat kami persilakan.

**GURU BESAR ILMU KEAMANAN INTERNASIONAL UKI (Prof. ANGEL DAMAYANTI, Ph.D.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,  
Salam sehat buat kita semua Bapak-Ibu.*

**Bapak-Ibu Dewan yang saya hormati,**

Kalau saya pakai masker apakah suara saya terdengar jelas? Bisa ya, karena takutnya agak berdeham-deham nanti jadi menakutkan buat Bapak-Ibu.

Baik, Bapak-Ibu, terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Satu kehormatan buat saya boleh berbagi apa yang saya coba pahami dari yang diberikan ke saya, ada empat naskah akademik, dan empat RUU kerja sama di bidang pertahanan Indonesia dengan empat negara, Uni Emirat Arab, Prancis, Brazil, dan Kamboja.

Saya sudah kirim *slide* mungkin boleh tolong dibantu oleh teman-teman komisi yang untuk bagi *slide*-nya. Sama ininya Mas, belum ya? Ya, ini dia sama apa..., *pointers*-nya.

**Baik, Bapak-Ibu Dewan yang saya hormati,**

Tentu empat draf RUU atau naskah akademik yang sudah disusun oleh teman-teman Kementerian Pertahanan, basisnya adalah ingin menciptakan sebuah kondisi yang aman. Mengadakan kerja sama pertahanan tentunya basisnya adalah seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tumpah darah Indonesia. Dan, itu artinya bagaimana caranya Kementerian Pertahanan dengan seluruh *stakeholder* terkait bisa menciptakan kondisi aman bagi bangsa Indonesia dan seluruh elemen yang ada di negara ini. Sehingga, ijin saya untuk memberikan sedikit gambaran tentang keamanan, kondisi keamanan hari ini itu seperti apa. Sebentar, ke mana ya Mas, arahnya *kok nggak* bergerak? *Oke, oh manual oh*, ya baik.

Mungkin ini sedikit saja saya tidak perlu panjang lebar tentunya hanya ingin menjelaskan tentang sebenarnya keamanan itu apa dan apa yang harus dilakukan. Kemudian, kita mencoba melihat sedikit tentang krisis keamanan global hari ini yang kita hadapi, supaya Bapak-Ibu Dewan juga bisa memahami apakah misalnya pengesahan Undang-Undang Kerja Sama Pertahanan ini, nanti akan menjadi relevan untuk menghadapi atau mengatasi keamanan yang kita hadapi hari ini, dan dampak krisis itu seperti apa dan implikasinya terhadap pertahanan Indonesia.

*Next*, sedikit saja menggambarkan tentang keamanan. Keamanan itu selalu ketika kita berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan negara lainnya. Potensi rasa terancam itu pasti muncul, apalagi kalau ada kekerasan dan paksaan di dalam sana berarti sudah ada isu keamanan di sana. Dan, masalah keamanan ini bisa menjadi masalah politik ketika ada aktor-aktor politik yang terancam, dalam hal ini tentu saja sebuah negara karena negara adalah entitas politik ya.

*Nah*, kita langsung saja, *next*, yang menarik adalah ada beberapa atau ada banyak sebenarnya definisi tentang keamanan. Arnold Wolfers misalnya mengartikan keamanan itu artinya bebas, tidak ada ancaman terhadap nilai-

nilai ya, atau tidak ada ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang. Tapi Barry Buzan mengatakan *nggak* mungkin manusia hidup itu tanpa ancaman sama sekali, jadi pasti akan selalu ada ancaman. Sehingga ketika kita bicara tentang keamanan itu bicara tentang upaya, atau kemampuan seseorang, atau suatu negara, atau suatu masyarakat untuk mempertahankan dirinya mulai dari identitas fisiknya sampai kemampuan dia untuk tetap bisa berfungsi. Sehingga, saya lebih setuju pada pengertian Barry Buzan bicara tentang keamanan berarti bicara tentang upaya atau kemampuan yang harus dilakukan oleh entitas politik, negara, dan yang paling kecilnya adalah manusia untuk mempertahankan diri mereka.

*Nah*, kondisi hari ini, Bapak-Ibu, kalau kita bicara tentang keamanan global, kita diwarnai dengan empat hal, empat ancaman besar ya kelihatannya cuma empat padahal dari empat ini banyak sekali penjabarannya. Yang pertama, nanti saya akan jelaskan ada ancaman tradisional yang kita hadapi, ancaman non tradisional, meningkatnya rivalitas, dan konflik internal atau konflik di dalam negara.

Ancaman tradisional tentu Bapak-Ibu Dewan, paham betul ya, ini bicara tentang ancaman yang disebabkan oleh pengerahan kekuatan militer suatu negara kepada negara lain. Artinya aktornya adalah negara dan yang dianggap sebagai ancaman adalah kekuatan militer negara lain. Di sini kita masih melihat atau paling tidak di Indonesia, gitu ya masih ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman tradisional ini. Masalah perbatasan kita punya misalnya perbatasan di Kalimantan..., Indonesia-Malaysia misalnya atau kalau kita bicara laut perbatasan Laut Natuna Utara dengan beberapa negara yang mengklaim, terutama Cina, misalnya ya. Kemudian invasi wilayah kita masih lihat, misalnya yang terjadi di Israel-Palestina hari ini atau di Rusia-Ukraina. Dan, bicara invasi wilayah bukan hanya wilayahnya yang dikuasai tapi tentu saja sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Ancaman nuklir ini juga masih *real*, potensi yang *real* nyata di depan mata kita terutama ada Korea Utara, kalau di kawasan Indo Pasifik dan perang antar negara, itu juga masih terjadi ya seperti Rusia-Ukraina yang kita lihat ancaman.

Ancaman non tradisional, *nah* bicara perang antar negara, mungkin kita melihatnya sudah jauh berkurang *gitu* ya, dibandingkan abad ke-19 atau abad ke-20, tapi masih ada *lah* satu, dua, atau beberapa di internal. Tapi justru yang meningkat drastis setelah globalisasi ini adalah ancaman-ancaman non tradisional, ya, *Cyber Crime*, ya. *Sorry*, ancaman non tradisional ini, Bapak-Ibu Dewan, saya pikir juga pasti sudah paham, ini adalah ancaman yang disebabkan bukan oleh negara pelakunya. Aktornya bukan negara dan dia bisa membahayakan, bukan saja negara, bukan saja pemerintah tapi juga masyarakat individu dan lingkungan.

Sehingga, bentuk ancamannya jauh lebih luas, korbannya, targetnya juga jauh lebih luas. *Cyber Crime* itu terjadi apalagi di bidang keuangan *financial*, data *gitu* ya bisa di-*hack*, diambil, dicuri. Kemudian, degradasi lingkungan, pemanasan global, bencana alam sewaktu-waktu bisa terjadi, pandemi yang kita hadapi beberapa tahun lalu itu adalah bentuk ancaman

non tradisional. Dan, *transnational organized crime* ini masih *real* di depan mata kita ya, tentang terorisme, *illegal fishing* misalnya, atau illegal, atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), TPPU juga pencucian uang, dan sebagainya itu masih banyak sekali dan *real* di depan mata kita. Dan kerugiannya juga cukup besar, pencurian ikan atau misalnya akibat dari terorisme, itu tentu cukup besar.

*Nah*, ancaman yang berikutnya adalah meningkatnya rivalitas kekuatan global. Ini sebenarnya hampir sama seperti era perang dingin, *cold war*, cuma bedanya hari ini teknologinya jauh lebih canggih, sampai ada teknologi *artificial...*, kecerdasan *artificial* ya. Kemudian hari ini biarpun rivalitas tinggi tapi saling ketergantungan secara ekonominya juga tinggi, ini bisa dilihat dari gambaran Amerika dan Cina. Satu sisi ini bisa membahayakan karena peningkatan teknologi berarti senjata yang digunakan juga jauh lebih mengancam, senjatanya bisa bukan hanya dalam bentuk apa..., yang bisa meledak tapi bisa dalam bentuk apa..., racun misalnya, atau penyakit, atau apa pun yang bisa membahayakan manusia, kehidupan manusia. Ya, karena penggunaan racun dalam perang itu juga sering terjadi.

*Nah*, saling ketergantungan ekonomi satu sisi mungkin baik karena itu akan menghindari perang atau mencegah perang, tapi di sisi lain itu juga bisa menimbulkan ketergantungan yang akhirnya membawa satu negara terjebak dalam hutang, itu yang perlu diawasi tentu saja. *Nah*, kenapa terjadi rivalitas atau peningkatan rivalitas kekuatan global? Karena memang ada kepentingan yang tumpang tindih di sana, terutama misalnya terkait dengan sumber daya alam atau jalur laut. Yang paling sering terjadi di misalnya..., di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dengan Cina, *gitu* ya, karena ada seperti dominasi Cina di Laut Cina Selatan.

Oke, kemudian kita cepat saja. Konflik *intra* negara ini juga masih terjadi *real* ya. Kudeta militer seperti yang terjadi di Myanmar Tahun 2021 dan ini menarik tentang kudeta militer di Myanmar Tahun 2021. Indonesia sempat dianggap ikut berkontribusi terjadinya kudeta itu, karena Indonesia dan Myanmar ada *join exercise*, *gitu* ya, kerja sama latihan militer bersama *gitu* ya, sehingga kerja sama itulah yang dimanfaatkan oleh militernya Myanmar untuk mengambil alih kekuasaan. Dan, beberapa negara dianggap juga terlibat karena mereka melakukan perdagangan senjata dengan Myanmar. Singapura, Amerika, kena juga dia di situ, padahal Amerika yang berteriak tentang kudeta ini tapi itulah yang terjadi.

Kemudian, separatisme itu juga masih *real* nyata di depan mata kita dan persekusi terhadap minoritas, sekali lagi misalnya di Myanmar contohnya terhadap Rohingya. Dan, Indonesia hari ini menjadi salah satu negara yang terkena dampak akibat *refugees*. ya kita harus menangani sekitar berapa ribu warga Rohingya yang melarikan diri atau yang datang ke Indonesia.

*Next, nah*, ini dampaknya dengan kondisi yang tadi saya sebutkan ada ancaman tradisional, ancaman non tradisional, rivalitas dua negara atau kekuatan global hari ini, dan masih banyaknya kondisi-kondisi internal, konflik internal suatu negara yang terjadi adalah ketegangan antar negara

meningkat, yang kalau tidak dikelola dengan benar itu menimbulkan perang. Dan karena kondisi yang tidak aman ketegangan di tiap negara, setiap negara tentu kalau dalam konteks orang paradigma realis atau neurealis mereka akan melakukan yang namanya *self help system*, dia akan membangun kekuatan dirinya sendiri untuk memastikan dia aman.

Tapi di sisi lain semakin dia meningkatkan keamanannya negara lain akan merasa terancam, sehingga sama-sama negara yang merasa terancam itu akan membangun juga kekuatan militernya. Dan, itulah muncul yang namanya *security* dilema masing-masing merasa saling terancam, sehingga masing-masing menguatkan kekuatan militernya dan terus berjalan seperti itu. Kemudian, kalau tidak diantisipasi yang tadi saya katakan *security* dilema ini bisa mengarah pada perang yang lebih besar lagi. Kondisi perang dunia pertama, perang dunia kedua terjadi itu karena tadi ada *insecurity*, dilema *security* itu.

Kemudian yang kedua, yang tidak kalah menakutkannya adalah ancaman tradisional dan non tradisional ini menyatu. Apa yang terjadi kemarin di Rusia, hari Sabtu, ada serangan penembakan di Moskow. Betul bahwa memang ISIS sudah mengakui mereka sebagai pelakunya, tapi kemudian Presiden Putin merasa ini bukan pekerjaan ISIS semata-mata, tapi lebih kepada *state sponsors terrorism*. Artinya, ada negara yang melatarbelakangi atau ada yang mendukung aksi terorisme tersebut. Bahkan beberapa sempat menyebut jangan-jangan Amerika pun terlibat karena Amerika sudah *ngasih* tahu lebih dulu, sejak Januari sudah dikasih tahu dan akhirnya kejadian ada aksi teroris. Dan, *state sponsors terrorism* ini memang sudah menjadi apa ya, ancaman sejak perang dingin ketika waktu itu Rusia masih Uni Soviet dengan Amerika Serikat seringkali terjadi. Ya, artinya terorisme sendiri saja sudah menjadi masalah dan ketegangan antar negara itu juga sudah masalah, akan menjadi semakin *concern* ketika dua hal ini menyatu. Yang artinya aksi terorisme yang disponsori oleh negara-negara yang saling berebut pengaruh, yang saling rivalitas, dan ketemu kepentingannya, *gitu* ya.

Kemudian yang ketiga, tentu saja yang kita hadapi hari ini efek dari segala macam ancaman tadi krisis finansial, efek dari pandemi, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, efek dari perang Rusia-Ukraina kita kekurangan energi, kita kekurangan pupuk ya, dan banyak lagi dampak-dampak akibat dari krisis tersebut. *Nah*, lalu apa implikasinya terhadap pertahanan Indonesia dan ini nanti saya akan coba masuk ke materi terkait dengan RUU.

Tentu saja dengan begitu banyaknya ancaman, baik yang tradisional maupun non tradisional, dengan kondisi internal, instabilitas politik, dan kemungkinan macam-macam ancaman-ancaman yang terjadi maka tentu saja pertahanan Indonesia itu harus membangun sebuah strategi yang komprehensif, melihat segala kemungkinan ancaman itu bisa terjadi. Dan, dengan segala macam ancaman, segala bentuk ancaman yang mungkin saja terjadi, Indonesia *nggak* bisa sendiri, berarti Indonesia harus melakukan kerja sama. Peningkatan kerja sama. Kalau Indonesia tidak bisa melakukan *self*

*help system gitu* ya, maka kemungkinan kedua adalah melakukan peningkatan kerja sama. Artinya apa yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan, meningkatkan kerja sama tentu saja hal-hal..., hal yang baik tapi saya juga punya beberapa catatan terkait dengan kerja sama kerja sama tersebut.

Kemudian yang ketiga, Indonesia *nggak* bisa lagi hanya melihat pada keamanan dirinya sendiri, tidak bisa hanya *in work looking*, keamanan nasional. Yes, keamanan nasional penting memastikan stabilitas politik, memastikan stabilitas ekonomi, dan lain sebagainya itu penting tapi kita *nggak* bisa pungkiri bahwa apa yang terjadi secara internasional, secara global itu akan mempengaruhi Indonesia, keamanan Indonesia. Yang tadi saya sebutkan, misalnya kejadian di Rusia-Ukraina ternyata berpengaruh terhadap krisis pangan di Indonesia atau krisis energi di Indonesia. Harga pupuk naik dan gas juga sulit didapat misalnya, energi sulit didapat sehingga harga-harga naik di Indonesia. Artinya Indonesia harus punya strategi yang bukan hanya memikirkan kepentingan nasional tapi juga harus memikirkan kepentingan regional dan internasional. Dan, memastikan 3 level tadi atau 2 level kalau regional dan internasional dijadikan satu itu bisa sama-sama stabil.

Dan yang keempat, karena ancaman itu sangat masif dan multi dimensi, banyak bentuknya, maka alutsista yang dibangunnya pun harus *Multipurpose*. Australia, atau Amerika, China sejak 2015 dalam *white defense paper* mereka, mereka *tuh* sudah sebutkan. Mereka membangun alutsista yang bukan saja bisa untuk menghantam negara lain, *gitu* ya, tapi juga misalnya menghadapi katakanlah pembajak di laut, perompak-perompak di laut atau menghadapi aksi-aksi terorisme. *Nah*, ini juga menjadi pertanyaan apakah misalnya Kementerian Pertahanan atau Indonesia hari ini bisa membangun sistem alutsista yang bisa menjaga laut kita misalnya, ya sambil juga apa..., memukul katakanlah ancaman-ancaman.

Saya lupa saya tadi mau sampaikan terkait dengan ancaman tradisional dan non tradisional. Mas, balikinnya *gimana* ya ini? Ada beberapa kasus, *nah* ini dia. Ada beberapa kasus Bapak-Ibu, Bapak-Ibu Dewan yang saya hormati, di Kepulauan..., *sorry* di Laut Natuna terutama di wilayah ZEE kita kan sudah sering kali itu menghadapi pencuri-pencuri ikan dari nelayan-nelayan Cina, kapal-kapal Cina yang besar itu nelayan-nelayan Cina, mereka mencuri ikan di wilayah ZEE kita.

Kami kebetulan melakukan penelitian di sana dan alasan para nelayan, kemudian mereka takut melaut ke wilayah ZEE dan mereka hanya melaut di wilayah laut kedaulatan. Kenapa mereka takut? Karena satu, kapal nelayan Cina itu memang besar dan ternyata dilengkapi dengan persenjataan. Dan nelayan-nelayan Cina itu sedikit banyak punya kemampuan bela diri yang mungkin karena di Cina ada wajib militer, jadi mungkin mereka pernah ikut itu *gitu* ya. Di samping itu, kapal-kapal ini juga sering kali dikawal dengan kapal-kapal patroli dari *coast guard*-nya Cina, *gitu* ya. Artinya, yang kita hadapi tadi ancaman tradisional dan non tradisional itu menyatu. Kita bukan cuma menghadapi pencuri ikan biasa, tapi kita menghadapi pencuri ikan yang

dikawal oleh *coast guard*-nya yang hebat itu *gitu*. Nah, kalau kita tidak bisa menyusun sebuah strategi yang komprehensif, alutsista yang komprehensif yang kasihan para nelayan kita, mereka *nggak* bisa melaut atau *nggak* berani melaut, ya ini yang mungkin perlu dipikirkan.

Ada lagi kasus lain, di laut Bintan, kapal-kapal yang melalui laut itu Selat Malaka yang mau masuk ke Singapura, di Singapura itu ada satu aturan setiap kapal yang mau masuk ke wilayah Singapura itu harus bersih, ada standarisasinya mereka. Ada standar kebersihan kapalnya, layak jalannya, bahan bakarnya, dan sebagainya. Yang terjadi apa, Bapak-Ibu? Ini penelitian kami sejak tahun 2019, kapal-kapal yang mau masuk ke Cina *eh sorry* ke Singapura, mereka buang sampahnya di laut Indonesia di sekitar Selat Malaka. Bukan hanya sekedar sampah-sampah bekas makanan atau apa, tapi bahan bakar kapalnya itu dibuang di laut kita. Dan, kenapa mereka buang dan mereka lakukan itu biasanya di malam hari ketika tidak ada pengawasan atau ketika patroli-patroli memang tidak melakukan pengawasannya. Nah, di sini sekali lagi tadi butuh sekali misalnya strategi pertahanan yang komprehensif yang bisa menghadapi, baik ancaman tradisional maupun non tradisional.

Nah, ini beberapa catatan mungkin, ya. Mungkin saya berikan catatan umum dulu, ya, karena sebenarnya setiap RUU-nya itu saya ada catatan-catatan per negara, tapi saya berikan dulu yang secara general. Terkait dengan kerja sama Indonesia dengan empat negara dan RUU atau *sorry*, draf RUU yang sudah disusun. Satu sisi kemenangannya Pak Menhan, Pak Prabowo menjadi Presiden, ya, dan Mas Gibran menjadi Wakil Presiden ini bisa menjadi salah satu faktor utama untuk penguatan pertahanan keamanan di Indonesia. Sehingga kita bukan lagi cuma berharap akan *Minimum Essential Force*, tapi harapannya malah bisa sampai *Optimum Essential Force* walaupun ini tentu saja butuh proses dan pendalaman.

Nah, yang perlu saya garis bawahi, ya, saya apresiasi dengan kerja sama-kerja sama yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Tapi melihat tadi penjelasan yang saya sempat sampaikan, apakah kerja sama-kerja sama pertahanan ini, ya, itu sesuai untuk atau bisa mengantisipasi persepsi-persepsi ancaman yang tadi saya sebutkan, itu satu. Dan, yang kedua, apakah itu selaras dengan postur pertahanan yang dibutuhkan oleh Indonesia atau postur pertahanan yang sudah disusun oleh Pemerintah Indonesia hari ini.

Karena yang saya pahami, yang pernah disampaikan juga oleh Kementerian Pertahanan, postur pertahanan Indonesia itu ditujukan pada penyelarasan pertahanan militer dan nirmiliter. Mungkin ini maksudnya adalah sama seperti tadi ancaman yang tradisional dan ancaman yang non tradisional. Melalui *smart diplomacy* dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar, gabungan *in word* dan *out work looking* artinya memperhatikan kepentingan nasional, regional, dan internasional, dan mendukung poros maritim dunia (*global maritime fulcrum*). Tapi yang saya lihat dalam kerja sama pertahanan Indonesia dengan empat negara, fokus utamanya tidak terlalu kepada poin-poin ini, ya. Laut tidak terlalu menjadi fokus utama

misalnya, kemudian kerja sama pertahanan yang nirmiliter misalnya tidak terlalu banyak, lebih banyak memang militernya, ya. Dan, saya tidak melihat misalnya konsep pertahanan pulau-pulau besar di dalam kerja sama pertahanan tersebut. Tapi mungkin ini nanti bisa dialami lagi Bapak-Ibu Dewan yang saya hormati.

Kemudian yang berikutnya, tentu saja kerja sama pertahanan Indonesia dengan empat negara ini dapat membantu Indonesia menghadapi situasi global hari ini ya, di mana ada perang Rusia-Ukraina, situasi yang memanas di Laut Cina Selatan ya. Dan, terkait perang Rusia-Ukraina yang menarik Bapak-Ibu, Rusia sudah akan menarik senjata-senjata yang mereka jual dikembalikan ke Rusia dalam rangka menghadapi Ukraina karena mereka sudah banyak menggunakan persenjataan. Kemudian, di sisi lain Indonesia juga kena yang namanya CAATSA (*Countering America's Adversaries through Sanction Act*). Artinya kita kena di sanksi oleh Amerika karena membeli persenjataan dari Rusia, sehingga kalau kita *nggak* bisa beli senjata dari Rusia dan kena kita CAATSA, Prancis menjadi salah satu pilihan tentu saja *gitu* ya dengan kemajuan teknologi mereka.

Kemudian, ya kita juga sedang menghadapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Tentu Indonesia tidak berkonflik langsung dengan Cina, tapi agresivitas China ini menimbulkan keresahan di Asean. Dan, Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asean tentu harus menunjukkan peranannya. Dan, kerja sama dengan Kamboja itu bisa menjadi salah satu poin, *entry point* untuk menunjukkan Indonesia punya tanggung jawab untuk Asean. Dan, menghadapi AUKUS ini juga tentu perlu dipertimbangkan beberapa kerja sama tadi diharapkan bisa membuat pengimbangan, ya, antara Indonesia dengan Blok yang dibentuk AUKUS tadi.

Kemudian, catatan lainnya secara umum adalah berdasarkan data sipil yang saya dapat Tahun 2022, belanja militer Indonesia itu hanya sekitar 0,7 sampai 0,8% walaupun idealnya katanya *sih minimum essential force* ini sejumlah pengamat bilang minimal 2%. Tapi, sepanjang sejarah 2009 sampai hari ini kayaknya belum ada yang sampai 1% atau di atas 1%. *Nah*, kemudian menjadi pertanyaan dengan kerja sama-kerja sama pertahanan apalagi misalnya kalau dengan Prancis, itu kita lebih banyak akan membeli dari Prancis ya. *Nah*, apakah anggaran itu bisa disesuaikan misalnya, itu yang pertama. Kemudian, implikasi kalau terbit undang-undang berarti kan ini juga akan bicara tentang anggaran, kerja sama latihan, kunjungan pejabat Kemhan atau TNI ke beberapa negara yang sudah ada ratifikasinya. Inikan tentu juga bicara tentang pembiayaan. *Nah*, ini mungkin nanti perlu dipikirkan.

Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan alutsista, betul memang lewat pembelian itu satu pilihan ya tapi selain itu juga harusnya kerja sama-kerja sama yang dilakukan Indonesia itu juga bisa membantu peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional. *Nah*, kalau memang kerja sama pertahanan ini bisa mendukung industri pertahanan nasional tentu akan menjadi lebih baik, ya.

Oke, itu dulu mungkin dari saya tapi nanti kalau yang secara spesifik per negara, saya punya catatannya, mungkin nanti Bapak-Ibu Dewan bisa langsung membaca saja di catatan yang saya sudah berikan kepada panitia. Mungkin sekian dari saya nanti kita bisa diskusi tanya jawab lebih banyak lagi.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

Baik, terima kasih, Prof.

Bapak-Ibu, tadi Profesor Angel Damayanti, Ph.D. Guru Besar Ilmu Keamanan UKI. Kemudian, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Muhammad Haripin, Ph.D. mengingat *slide*-nya agak banyak ini kami minta untuk *concise*, Pak. Wajah-wajahnya pada puasa semua di sini.

Terima kasih, silakan, Pak.

**KAJIAN KEAMANAN DAN KONFLIK DI PUSAT PENELITIAN POLITIK  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) (MUHAMAD HARIPIN,  
Ph.D.):**

Baik, terima kasih banyak.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,  
Rahayu,

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I  
DPR RI,  
Yang saya hormati pula, Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI,**

Perkenalkan saya memberikan suatu masukan, suatu pemikiran tentang rencana pengesahan atau ratifikasi empat Rancangan Undang-Undang Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dengan Brazil, Kamboja, Persatuan Emirat Arab, dan Prancis.

Baik, saya akan membahas atau membagi penjelasan saya ke dalam empat bagian utama. *Next* berikutnya Mas, *slide* berikutnya. Oke, jadi ada empat bagian utama, saya..., yang pertama, semoga Bapak-Ibu semua berkenan saya ingin menyuguhkan suatu diskusi konseptual atau semacam diskusi teoritis tentang kerja sama pertahanan atau diplomasi pertahanan. Mungkin sudut pandang saya berbeda dengan Profesor Angel, tadi yang lebih menekankan kepada ancaman keamanan tapi saya ingin melihat atau meneropong empat RUU ini dari sudut pandang kerja sama pertahanan atau diplomasi pertahanan. Jadi, mungkin saya bisa berkontribusi dalam diskusinya di situ.

*Nah*, ada dua hal, ada subbagian tentang konsepsi ini yang ingin saya bahas, ingin saya berbagi dengan Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, tentang dimensi dari kerja sama pertahanan dan yang kedua adalah tipologi kerja sama pertahanan. Ini akan saya sampaikan di kemudian kesempatan.

Kemudian setelah itu saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk melihat konteks makro begitu ya, yang saya bagi ke dalam dua bagian, jadi ada konteks global atau juga konteks nasional yang lagi-lagi saya akan melengkapi presentasi dari Profesor Angel tadi. Jadi, saya ingin memperlihatkan bahwa tentu saja kerja sama pertahanan Indonesia dengan keempat negara ini tidak terjadi dalam suatu ruang vakum, tidak terjadi dalam satu ruang politik yang kosong begitu, hanya ada 5 pemain di sini hanya ada Indonesia, Brazil, Kamboja, Uni Emirat Arab, dan Prancis, tidak. Tapi tentu ada hal yang lebih besar di sini dan saya pikir hal-hal itu yang perlu juga kita singgung, demikian.

Kemudian bagian ketiga, saya ingin kita lebih detail lagi melihat sebetulnya bagaimana atau di luar dari RUU yang ada ini ya. Sebetulnya bagaimana interaksi atau lebih spesifiknya saya menggunakan istilah diplomasi pertahanan, yang berlangsung di antara Indonesia, Brazil, Kamboja, Persatuan Emirat Arab, dan Prancis ini. Kenapa saya menggunakan kata-kata diplomasi pertahanan? Karena sifatnya yang memang lebih luas ketimbang kerja sama pertahanan. Diplomasi pertahanan bermakna tidak hanya interaksi atau komunikasi yang bersifat formal atau institusional, tapi juga menyangkut komunikasi yang bersifat informal. Jadi, saya harap dengan kita melihat ini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya peta atau *existing condition* begitu ya, dari relasi kita dengan keempat negara yang akan kita bahas ini.

Kemudian di bagian terakhir keempat, saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk kita sama-sama melihat, mengecek begitu, mengidentifikasi apakah 4 naskah Rancangan Undang-Undang Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Brazil, Indonesia-Kamboja, Indonesia-Persatuan Emirat Arab, dan Indonesia-Prancis ini bisa kita golongan ke dalam suatu kebijakan yang katakanlah secara akademik itu *acceptable* begitu. Kemudian juga komprehensif, dan juga memang memiliki peluang atau potensi sangat besar memang untuk bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi masyarakat nasional, maupun bagi masyarakat secara global, demikian.

Baik, saya ingin langsung saja ke bagian pertama dari presentasi saya, yaitu tentang kerangka konseptual. Saya harap Bapak-Ibu, bisa bersabar di bagian ini begitu, saya harap saya tidak terlalu membosankan begitu. Tapi di sini ada 4 hal penting saya pikir yang harus kita..., harus kita pegang kita jadikan indikator begitu ya ketika kita membicarakan, ketika kita memformulasikan suatu kerja sama pertahanan dengan negara lain begitu.

Yang pertama adalah dimensi otonomi, jadi kita harus melihat atau secara teoritis ya. Secara teoritis ini, otonomi ini berarti bahwa memang kerja sama itu dilandasi oleh rasa hormat, dan menempatkan kedaulatan, dan kepentingan nasional di atas yang lainnya begitu. Jadi, ini kita untuk

menghindari suatu katakanlah suatu kerja sama pertahanan yang seolah-olah itu adalah antara dua entitas yang sejajar, tapi sesungguhnya mungkin ada dalam situasi yang skenario yang negara yang *proxy* begitu. Jadi, kalau dalam secara konseptual, otonomi itu berarti bahwa memang penghormatan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional itu ada di puncak.

Kemudian, dimensi yang kedua adalah efikasi. *Nah*, efikasi ini sebetulnya berkaitan dengan efektivitas begitu. *Nah*, jadi apa maksudnya? Jadi, kita ingin melihat apakah kerja sama pertahanan yang dia formulasikan atau diimplementasikan itu memang dapat berlangsung secara efektif dan memang menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi kepentingan nasional begitu. *Nah*, ini maksudnya apa? Jadi, kita tentu tidak berharap bahwa kerja sama yang telah ditandatangani ini bersifat katakanlah hanya seremonial, atau prosedural, atau memang hanya untuk memenuhi sopan santun internasional begitu. Tapi, memang kita ingin ada satu hal yang memang didapatkan oleh Indonesia dari kerja sama ini. Jadi, kita harus memastikan itu memang ada begitu.

Dimensi yang ketiga adalah input legitimasi. *Nah*, ini lagi faktor legitimasi yang sangat penting ya yang mungkin penting kita bahas juga, karena mungkin kalau kita bercermin kepada perdebatan kira-kira setahun yang lalu, ya, yang yang sudah rampung kemarin-kemarin ya, ketika kita berdebat tentang *defense cooperation agreement* dengan Singapura begitu. Karena di situ kan kalau saya lihat masalahnya kan ada legitimasi itu ya, legitimasi yang lemah dari masyarakat terhadap pemerintah maupun dari parlemen pun terhadap pemerintah *gitu*, makanya berlarut-larut *gitu*. *Nah*, makanya ini saya pikir kita perlu angkat tentang *input* legitimasi ini, kenapa? Karena ini berkaitan dengan bagaimanakah publik secara luas maupun secara khusus, ya, termasuk juga dalam konteks forum kita hari ini, RDPU ini bisa melakukan, bisa berpartisipasi dan juga bisa melakukan satu dialog begitu atas substansi kerja sama pertahanan dengan negara lain itu.

Dan, beriringan dengan itu tidak kalah penting juga adalah adanya *output* legitimasi begitu. *Nah*, *output* legitimasi ini memang lebih bersifat keluaran. Jadi, sebetulnya memastikan bagaimana ketika suatu kerja sama pertahanan itu ditandatangani, kemudian juga diratifikasi itu tidak sekedar menjadi tumpukan dokumen di perpustakaan atau di meja pejabat saja begitu. Tapi memang kerja sama itu memiliki dampak dan dampaknya itu bisa diukur *gitu* dan memang bisa dianalisis, apakah memang menghasilkan keluaran yang bermanfaat atau sesuai dengan..., atau selaras dengan apa yang ditetapkan atau sesuai dengan apa yang memang menjadi kepentingan nasional, begitu.

*Nah*, yang kedua ini adalah tentang tipologi. Masih kita berbicara dalam konteks kerangka konseptual kerja sama pertahanan. Jadi di sini kita bicara kerja sama pertahanan dalam 5 aspek, pertama bentuk kerja samanya, kedua dalam bentuk tujuannya objektif, ketiga durasi, keempat domain, dan kelima adalah *framework*-nya atau kerangkanya. Ketika kita bicara tentang bentuk kerja sama, setidaknya kita bisa bayangkan ada 3 bentuk, ada yang bentuknya bilateral yang kita bahas pada siang hari ini antara Indonesia-

Brazil, Indonesia-Kamboja, Indonesia-Persatuan Emirat Arab, dan Indonesia-Prancis. Tapi kita juga dalam..., dalam hal yang lain kita juga mengenal yang namanya minilateral ya seperti AUKUS, seperti Quad, dan sebagainya. Tapi dalam konteks multilateral kita juga kenal ada yang namanya misalkan ADME atau IDMM Plus. *Nah*, jadi ini bentuk-bentuk kerja sama pertahanan yang saat ini berlaku dalam dunia internasional.

Dari sisi objektif dari sisi tujuan ada 2, ada memang kerja sama pertahanan yang bersifatnya atau tujuannya memang spesifik begitu, untuk mengurus atau untuk meng-*address* satu masalah yang spesifik, tapi ada juga yang lebih bersifat umum begitu. Jadi isu-isu besar, isu-isu yang bersifat multisektoral itu yang dibahas. Kemudian yang ketiga, juga dari sisi durasi ada yang durasinya memang pendek tapi ada juga yang berdurasi panjang. Kemudian dari sisi domain, ada yang berurusan hanya untuk operasional aspek jadi hal-hal yang lebih bersifat teknis, tapi ada juga yang lebih bersifat investasi atau berjangka panjang sebetulnya. Jadi, memang terkait dengan industri pertahanan, kerja sama jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian yang kelima dalam kerangka *framework* atau apa *framework*, *sorry*. Ini ada yang memang terinstitusionalisasi tapi ada juga yang tidak terinstitusionalisasi. Jadi, memang ada yang secara formal begitu tapi ada juga yang nonformal.

*Nah*, baik ini saya tidak akan mengulang, ini Bapak-Ibu yang terhormat pasti juga sudah bisa membacanya, baik di naskah perjanjian resmi maupun naskah apa..., RUU-nya, maupun juga di naskah akademiknya, jadi saya tidak akan mengulang. *Nah*, tapi di sini saya hanya ingin sedikit saja menyinggung tentang..., atau menyambung ya apa yang tadi disampaikan Profesor Angel tadi, tentang apa tantangan global yang ada begitu. Jadi memang dibalik atau katakanlah..., di balik ada rencana kerja sama pertahanan kita dengan Brazil, Kamboja, Persatuan Emirat Arab, dan juga dengan Prancis di situ ada berbagai macam tujuan, ada berbagai macam apa kepentingan bersama yang coba kita negosiasikan. Tapi, kita juga memang hidup dalam lingkungan keamanan global yang bisa dibilang cukup rentan begitu.

Kalau saya bisa mengutip satu sejarawan yang bernama Adam Tuss ya, ini dia lagi ramai *gitu* kalau kita bicara soal apa studi tentang krisis. Dia menyebutkan bahwa situasi hari ini *tuh* dia sebut sebagai *polycrisis* begitu. Jadi *polycrisis* itu adalah krisis dalam berbagai macam bentuknya yang terjadi secara bersamaan begitu. Jadi, dalam apa pada saat ini juga sebetulnya sudah kita alami begitu ya, jadi tadi Prof Angel menyinggung soal covid-19, kemudian juga kita juga menyaksikan ada konflik bersenjata, ada krisis iklim, dan juga ada kenaikan tinggi biaya hidup ya, Bapak-Ibu. Pasti dengan mudah melihat masalah ini kalau kita mencermati berita-berita di Eropa ya atau di Inggris ya tentang kenaikan biaya hidup di sana. Tapi di sisi lain yang lebih dekat dengan kita juga tadi Prof Angel juga sudah membahas ya ada masalah atau katakanlah ada instabilitas di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara dalam konsepsi kita. Kemudian juga di kawasan lain di Timur Tengah juga sampai hari ini juga kita masih menyaksikan, ya, apa konflik,

eskalasi konflik yang tinggi di antara kelompok Hamas dan juga dengan Israel.

Kemudian, ini untuk dalam konteks makro, dalam konteks belajar..., *sorry*, belanja militer global. Di sini saya ingin menyampaikan satu daftar dari *military balance* 2024, ini adalah daftar 15 negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Dan, mungkin beruntungnya buat Indonesia begitu, ada dua negara di dalam daftar ini yang kita sudah memiliki apa kerja sama pertahanan dan kita bahas siang hari ini ya. Yang pertama adalah Prancis, yang dalam daftar global ada di urutan ke-8 dan yang kedua adalah Brazil yang di dalam daftar ini ada di urutan ke-14 *gitu*. Jadi, saya mengamini apa yang diucapkan oleh Prof Angel tadi, bahwa ada begitu banyak potensi kesempatan yang bisa kita raih, kita raup dari kerja sama pertahanan dengan Brazil dan Prancis ini begitu.

Kemudian untuk konteks nasional, *nah* ini mungkin yang juga penting ya dan mungkin bersifat *counter intuitive* begitu dengan apa..., komentar ataupun juga kajian-kajian yang ada sekarang begitu, ini saya menggunakan data dari Global Peace Index 2023 dan 2022, yang menyebutkan bahwa Indonesia secara umum berada dalam kondisi yang damai sebetulnya. Jadi, damai ini kalau kita tempatkan dalam konteks studi hubungan internasional, dalam studi keamanan adalah suatu modal yang sangat penting ya. Perdamaian atau stabilitas ini modal yang sangat penting, baik kita untuk melakukan pembangunan, baik kita untuk melakukan akselerasi dalam bidang-bidang lainnya begitu.

Baik, *nah*, setelah itu tadi saya sudah bicara, saya akan lebih cepat. Saya tadi sudah bicara soal kerangka konseptual dari kerja sama pertahanan atau juga diplomasi pertahanan. Kemudian juga tadi saya sudah menyampaikan juga gambaran singkat tentang konteks global, konteks nasional, Bapak-Ibu sekalian terhormat. Sekarang izinkan saya untuk mengajak Bapak-Ibu sekalian, untuk melihat lebih dalam lagi sebetulnya tentang bagaimana hubungan, atau interaksi, atau diplomasi pertahanan Indonesia dengan Brazil, dengan Kamboja, maupun juga dengan Persatuan Emirat Arab, dan juga dengan Prancis ya.

Dan, ini jadi sebetulnya data ini merupakan studi yang sedang kami lakukan, saya dan teman-teman saya lakukan di BRIN. Jadi kami apa membuat satu pangkalan data tentang diplomasi pertahanan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kami ingin mengidentifikasi siapa mitra utama kita, mengidentifikasi kesempatan apa yang ada dalam konteks diplomasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang berharga juga. Dari data-data ini juga kalau misalkan Bapak-Ibu melihat naskah akademik 4 RUU yang ada juga sebetulnya apa data-data kami bersinggungan juga begitu, karena memang ya apa sumber datanya sama ya jadi dari berbagai macam sumber terbuka, baik itu *website* resmi Kemhan, Kemlu, DPR, dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa cek di situ.

*Nah*, jadi yang pertama untuk konteks diplomasi pertahanan Indonesia dengan Brazil. Memang secara kuantitas memang tidak begitu sering begitu ya, intensitasnya tidak tinggi begitu. Kalau kita bandingkan misalkan diplomasi pertahanan kita dengan Amerika Serikat, atau dengan Tiongkok misalkan, atau dengan negara-negara *major power* lainnya dengan Jepang, atau dengan Singapura, dan sebagainya begitu, jadi memang tidak terlalu tinggi *gitu*. Tapi, kalau kita melihat selama katakan 14 tahun terakhir, kita melihat ada *trend* yang naik ya, ya juga didukung juga tentu saja oleh ini ya penandatanganan kerja sama pertahanan ini pada Tahun 2017 silam ya.

*Nah*, namun demikian *trend* yang berbeda ditunjukkan oleh relasi atau diplomasi pertahanan kita dengan Kamboja begitu. Jadi, mungkin Bapak-Ibu sekalian, juga ingat bahwa kita Indonesia dengan Kamboja itu memang sama-sama negara anggota Asean. Tapi lebih dari itu sebetulnya Indonesia itu punya tempat yang spesial di Kamboja *lah* ya kita bisa bilang demikian. Karena Indonesia salah satu pihak yang turut berkontribusi dalam konteks resolusi konflik di sana pada pertengahan tahun 90-an, dalam konteks *Jakarta Informal Meeting* dan sebagainya. Namun, yang kedua juga adalah bahwa TNI kita atau Kopassus kita juga adalah menjadi..., memberikan pelatihan ya kepada pasukan pengamanan Perdana Menteri Kamboja dan juga pada unit *contra terror* di sana, jadi memang satu hubungan yang spesial. Tapi kalau kita melihat *tren*-nya memang sayangnya ada penurunan meskipun hanya sedikit begitu. Tapi tentu saya pikir dalam konteks kerja sama pertahanan ini maupun juga dalam konteks apa yang lebih luas, dalam kontes Asean, maupun IDMM saya pikir *trend* ini akan akan lebih membaik ke depannya.

Kemudian *trend* yang naik juga kita cermati berlangsung dalam konteks hubungan Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yang Tahun 2022 sangat tinggi begitu ya kalau kita bandingkan, tapi kalau secara umum memang fluktuatif ya. 2007, 2018, 19 naik, tapi 2020, 21 ini juga faktor covid ya menurun, tapi 2022 mulai naik juga. Dan, ya kita juga maklum ketika Tahun 2021 kan penandatanganan..., ini ya penandatanganan kerja sama pertahanan yang kemudian diikuti dengan berbagai macam pertemuan. Yang beritanya pun sangat mudah kita temukan ya pertemuan Pak Menhan, Prabowo Subianto dengan berbagai macam pemangku kepentingan di Persatuan Emirat Arab.

Kemudian, terakhir dengan Prancis, ini juga panoramanya saat dinamis ya naik turun juga begitu. Jadi, apa di awal Tahun 2000-an di awal dekade pertama abad 21 memang masih rendah begitu tapi kemudian meningkat pada Tahun 2018 tapi di 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini juga mulai menurun. Tapi, sepertinya melihat ada banyak kerja sama yang diinisiasi oleh Pak Menhan, dalam 2 tahun terakhir saya optimis dalam beberapa tahun ke depan juga sepertinya diplomasi pertahanan Indonesia dengan Prancis juga akan ini..., akan akan *bounce back* ya akan kembali meningkat begitu. Jadi kita akan monitor sama-sama.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya memasuki bagian akhir dari pemaparan saya. Mohon izinkan saya bisa mengambil waktu Bapak Ibu sekalian, 2 menit saja begitu untuk menutup presentasi ini. Jadi, secara

umum..., secara umum kita bisa mengevaluasi atau mengidentifikasi ya. Kalau kita baca secara seksama naskah yang ada, yang saya terima, dan mungkin Mbak Curie dan Prof. Angel juga terima ya ada 4 naskah, dan naskah perjanjian asli, naskah RUU, kemudian naskah akademik ya dari kerja sama pertahanan Indonesia-Brazil, Kamboja, Persatuan Emirat Arab, dan juga dengan Prancis.

Kita bisa lihat secara umum bahwa dari sisi dimensi otonomi begitu, kita melihat bahwa perjanjian yang ada secara tertulis setidaknya memang apa ya..., meletakkan kedaulatan, walaupun juga sikap saling menghormati itu di tempat yang utama begitu. Jadi, memang ini bukan satu kerja sama yang bersifat timpang atau juga asimetris, tapi memang kerja sama yang lebih setara begitu.

Kemudian juga dari sisi efeksi, dari sisi efektifitas juga kita menilai bahwa potensi kerja sama ini bisa dilaksanakan, pertama. Dan kedua juga bisa sukses juga kelihatannya tinggi, kenapa? Karena kerja sama ini juga kita punya sejarah diplomatik yang panjang dengan 4 negara ini. Dan, sebelumnya juga kita juga punya berbagai macam ini ya, berbagai macam inisiatif di bidang pertahanan yang sudah berjalan sampai sekarang.

Kemudian, dari sisi *input* legitimasi dan *output* legitimasinya pun demikian. Jadi, saya pikir dukungan dari masyarakat maupun dari berbagai macam pemangku kepentingan di Indonesia pun tinggi, tidak hanya dari Kemhan tapi mungkin juga dari Mabes TNI mungkin dari Menkopolkam, dan sebagainya. Jadi, saya pikir ini akan berkontribusi positif bagi, tidak hanya bagi pemantapan kepentingan nasional kita tapi juga bagi pembangunan secara umum.

Tapi mungkin izinkan saya untuk ada satu catatan kecil tentang *output* legitimasi ini. Kenapa? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa *output* legitimasi ini berkaitan dengan dampak, begitu. Jadi saya sampaikan tadi, jadi memang di sini ada..., atau memerlukan peran yang lebih atau katakanlah memang peran yang *sustainable* dari DPR itu sendiri untuk memberikan pengawasan ya, *overside* yang berkelanjutan dari DPR tentang implementasi dari kerja sama pertahanan itu sendiri. Jadi, jangan sampai kerja sama ini hanya berakhir ditanda tangan, kemudian ketika apa prakteknya atau ketika pertemuannya tidak berjalan begitu.

Kemudian, dari sisi kalau kita melihat tipologinya pun di sini bisa kita lihat bahwa semua *checklist*-nya terisi demikian. Jadi, apa artinya kenapa ini dari sisi tipologi ini menunjukkan apa hal yang positif begitu. Jadi, yang pertama kita bisa simpulkan bahwa keempat RUU ini ya, pertama memang adalah suatu kerja sama pertahanan yang lebih bersifat substansial begitu. Kemudian juga, daya berjangka waktu panjang, jadi bukan suatu perjanjian keamanan yang bersifat pragmatis, *ceremonial*, dan *procedural* saja hanya untuk katakanlah memenuhi basa-basi pergaulan internasional, tapi memang ada dagingnya begitu dari kerja sama ini.

Dan juga, kita bisa lihat juga dari sisi tujuan juga ada tujuan-tujuan khusus yang ingin di-*address* dari perjanjian ini, misalkan seperti industri pertahanan, kemudian juga pelatihan, tapi juga ada tujuan yang lebih umum begitu, tapi misalkan seperti untuk meningkatkan kerja sama, meningkatkan persahabatan, dan lain sebagainya. Jadi ini saya pikir hal-hal yang sangat positif dan berdasarkan apa hal demikian, saya pikir akan sangat baik demikian bagi pemerintah Indonesia atau bagi DPR khususnya Komisi I jika bisa menyetujui ratifikasi keempat RUU ini.

Terima kasih banyak, Pimpinan RDPU Komisi I DPR RI, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan. Jika ada hal yang tidak jelas nanti mungkin bisa kita dalam di sesi tanya jawab.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

*Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Bapak Muhamad Haripin.

Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada Ibu Curie Maharani. Sekali lagi kami mohon agar dalam penyampaian paparannya singkat mungkin, Bu, karena tadi juga sudah banyak aspek teoritis yang disampaikan oleh kedua pemapar sebelumnya.

Kami persilakan.

**DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS BINUS (CURIE MAHARANI SAVITRI, Ph.D.):**

Terima kasih, Bapak Ketua Sidang.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Bapak dan Ibu yang mungkin sedang berpuasa dan yang tidak, tapi apa mungkin juga ikut apa menahan nafsu karena menyesuaikan dengan yang berpuasa.

Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akan mencoba untuk lebih singkat tapi mungkin ini akan didapat kalau misalnya mengundang para akademisi yang sekaligus peneliti. Jadi, kami tidak bisa tidak menyampaikan data yang sebegitu banyak, karena memang kami tidak ingin memberikan rekomendasi yang tidak berbasiskan fakta atau *informed decision*, ya. Dan, apa..., untuk saya sendiri karena memang kompeten saya adalah lebih

kepada industri pertahanan dan ekonomi pertahanan, saya akan coba lebih fokus kepada dua sektor tersebut.

*Next*, jadi memang sedianya ada 4 fokus yang akan saya hantarkan kepada Bapak dan Ibu sidang yang terhormat. Yang pertama adalah diplomasi pertahanan untuk apa? Ya. Dan, kemudian perbandingan ekonomi pertahanan Kamboja, Prancis, Brazil, dan Uni Emirat Arab kita bicara tentang 4 negara yang sangat berbeda, baik itu menurut ukuran ekonominya, lokasi geografis, kedekatan dengan kita, baik itu dalam kerja sama pertahanan maupun kerja sama yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah rekap lini masa, kedalaman kerja sama dan manfaat DCA dalam konteks bilateral. Mungkin nanti ini saya akan bahas secara cepat karena ini sebenarnya juga rekap dari naskah akademik yang diberikan, ditambah dengan tinjauan dari kami. Dan terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Ini mungkin panitianya menyesuaikan dengan *power point* yang baru karena saya mengirimkan revisi, ya.

Yang pertama adalah diplomasi pertahanan untuk apa. Memang tadi rekan saya Mas Arifin sudah menyampaikan definisi dan beberapa tujuan ya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah diplomasi pertahanan ini harus menjadi alat, tidak juga tidak hanya diplomasi politik luar negeri tapi diplomasi dari kebutuhan pembangunan militer kita atau pembangunan kekuatan ketahanan. Saya tidak akan berpanjang untuk menjelaskan mengenai strategi yang baru, kemudian tantangan-tantangan kita karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Angel.

Tapi saya, izinkan saya untuk mengajukan satu saja persoalan yang sedang kita hadapi sekarang adalah diversifikasi alutsista. Kita punya jenis alutsista terbanyak di Asean, tapi tidak ada kaitan antara siapa *supplier* kita dengan jenis senjata yang kita beli. Artinya apa? Kita tidak punya strategi. Dan juga diperparah dengan CAATSA (*Countering America's Adversaries through Sanction Act*) yang melarang transaksi kita dengan Rusia dan 3 negara lainnya. Kita kesulitan untuk mengoperasikan alutsista yang kita punyai yang berasal dari Rusia. Dan juga kita kesulitan melakukan *maintenance*, ya. Dan, kemudian ada pertanyaan yang saya sampaikan ke Sesko TNI kemarin. Kita mau buang saja alutsistanya atau kita teruskan, tapi kita ganti mitra dengan siapa. Dan, ini adalah persoalan-persoalan yang sangat relevan yang harus dipecahkan dengan diplomasi pertahanan seperti ini *gitu* ya.

*Next*, bisa digerakkan atau saya yang gerakkan? Mohon maaf, ini ke arah? *Oh*, ke mana saja. Arahnya ke mana ya? Mohon maaf, oke ini ya.

Hal yang kedua adalah kalau kita meninjau diplomasi pertahanan Indonesia selama ini maka ada 3 sasaran utama, yakni adalah membangun kapabilitas, kemudian mohon maaf yang pertama adalah membangun rasa percaya *confidence building measures*, kemudian meningkatkan kapasitas pertahanan, dan ketiga adalah industri pertahanan, kerja sama industri pertahanan. Dan, ini bisa dilakukan oleh berbagai maaf, berbagai aktor, dan juga berbagai format kerja sama salah satunya yang menjadi standar

internasional ada DCA. Meskipun tidak ada definisi DCA itu apa dan harus mencakup apa, begitu tapi dianggap standar internasional. DCA itu adalah kita punya kerja sama pertahanan yang baik, di atas DCA adalah tentu saja praaliansi dan di atasnya aliansi.

Kemudian ada banyak di bawah kerja sama pertahanan forum *two plus two* begitu ya, yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dalam satu forum, sehingga lebih dapat mensinkronisasi kedua kepentingan yang ada dan kemudian pertemuan-pertemuan pada level *senior official* misalnya, *strategic dialogue*, dan juga ada yang melibatkan industri pertahanan secara langsung. Ini adalah paparan yang saya kutib dari Mas Aloysius Selwas Taborat, diplomat dari Kemlu yang memang melakukan kajian diplomasi pertahanan.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini mengenai evaluasi diplomasi pertahanan. Saya tidak tahu dan saya menunggu apakah ada evaluasi khusus dari dewan mengenai diplomasi pertahanan selama ini. Tapi satu yang saya pahami adalah kita selalu terlambat untuk meratifikasi DCA. Terkadang kerja samanya sudah sangat jauh seperti dengan Korea Selatan kemudian ratifikasi DCA-nya menyusul, akibatnya ada banyak aspek legal yang tidak bisa kita amankan untuk memastikan kerja sama itu berlangsung sesuai dengan kepentingan kita. Dan, kalau misalnya ada pelanggaran itu bagaimana kemudian sanksi atau respon kita.

Yang kedua adalah diplomasi pertahanan Indonesia mengalami kesenjangan antara tujuan dengan keluaran, misalnya kita punya kerja sama industri pertahanan itu..., mohon maaf ini saya salah *mencet*, oke. Akan tetapi kebanyakan dari kerja sama industri pertahanan itu kita hanya menjadi konsumen atau menjadi *market* dari negara lain ya. Dan, memang dari kita sendiri juga dari pelibatan saya di beberapa *event* itu menunjukkan kita belum cukup komprehensif dalam merumuskan kita sebenarnya mau apa, agendanya apa, apa yang mau kita capai dari diplomasi pertahanan, sehingga diplomasi pertahanan ini menjadi sesuatu yang masih *under study* dan *under develop*.

Dan, kalau Bapak dan Ibu melihat yang namanya *lowy power index*, diplomasi pertahanan di Indonesia itu termasuk salah satu yang sebenarnya bagus tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, kita beranjak kepada fakta utama 4 negara yang akan kita bahas di sini. Apa yang kita tahu mengenai mereka, tentu saja kedalaman kerja sama, kemudian lini masa itu sudah ada di dalam naskah akademik, tapi bagaimana dengan kondisi pertahanan kapabilitas kepentingan negara-negara tersebut. Ini adalah fakta utama berdasarkan GDP anggaran pertahanan, jumlah personil militer, jumlah personil yang ikut dalam pasukan perdamaian, dan kepentingan mereka di Indo Pacific.

Secara GDP kita bisa melihat bahwa Brazil dan Prancis adalah negara yang ekonominya besar, sedangkan UEA itu adalah negara yang *medium* ya *small to medium*, dan Kamboja adalah negara kecil. Dan ini terefleksi dari anggaran pertahanan mereka dan jumlah personil militer mereka. Meskipun di

sini kita bisa melihat Kamboja ternyata punya personil militer lebih besar daripada Prancis dan Brazil *gitu* ya, meskipun anggaran pertahanannya ini sayangnya tidak bisa di apa..., didapatkan ya melalui sumber-sumber terbuka. Kemudian, Kamboja juga punya misi perdamaian di bawah bendera PBB sebagaimana Prancis dan Brazil sedangkan UEA tidak memilikinya.

Dan, mungkin yang lebih penting di sini adalah bahwa Prancis memiliki kepentingan langsung di Indo Pacific ya karena mereka punya *overseas territories*, mereka punya lebih dari 1,5 juta warga negara yang harus dilindungi, dan juga mereka berkepentingan karena mereka bagian dari aliansi Amerika Serikat *gitu* ya. Sedangkan, Kamboja adalah Anggota Asean, saudara kita ya yang sayang posisinya ini terjepit antara negara besar yang sedang berkembang, Cina, ya dan agak jauh dari negara Asean utama seperti kita, sehingga ada kecenderungan melakukan *bandwagoning* atau dekat dengan Cina. Mungkin akhir-akhir ini Bapak dan Ibu mendengar betapa Cina sudah mulai menggunakan wilayah Kamboja sebagai pangkalan apa namanya..., kapal perang mereka *gitu* ya. Dan, Kamboja sekarang sedang membangun salah satu apa namanya..., pelabuhan terbesar ya untuk bisa *hosting* kapal-kapal perang dari Cina.

Kalau ditanya kepada rekan-rekan di Kamboja, apakah berarti anda beraliansi? Tidak, tidak beraliansi. Tapi kami sadar bahwa kami terlalu dekat dengan Cina dan terlalu jauh dari yang lain. Jadi, kalau ada apa-apa yang lain kayaknya sulit untuk bisa membantu. Jadi ini harus bisa kita pahami logikanya Kamboja itu mirip dengan logikanya Singapura. Singapura kan bilang “tidak, kami tidak beraliansi dengan Amerika Serikat, tapi kami membebaskan Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas kami untuk logistik”. Di saat damai, di saat perang ini masih belum ada jawaban.

Oke, ini izinkan saya untuk menampilkan beberapa karakter dari 4 negara yang kita kaji, karena beberapa di antaranya utamanya Prancis dan Brazil ini adalah pastinya mengincar kita sebagai pasar pertahanan. Kalau kita lihat seberapa besar mereka tentunya Prancis adalah yang paling besar, tapi secara pertemuan ekonomi ternyata UEA yang paling pesat meskipun sangat fluktuatif, artinya memang kondisinya tidak stabil *gitu* ya.

Kemudian anggaran pertahanan Prancis ini besar mereka mencapai 2% PDB, yang mana itu normal untuk Anggota NATO. Sedangkan, Brazil memiliki belanja pertahanan paling kecil tapi secara ratio PDB masih 1% dan karena pertumbuhan ekonominya tidak baik-baik saja, sehingga sulit dibayangkan Brazil akan memperbesar anggaran pertahanannya. UEA anggaran pertahanannya itu hampir 6% PDB, berarti mereka punya persepsi ancaman yang sangat besar. Tapi ini juga berarti mereka akan sulit meningkatkan lagi artinya sudah mentok. Dan, ini akan beresiko terhadap pasar pertahanan mereka yang saat ini kita harus lihat itu pasar pertahanan yang sudah maksimal.

Yang kedua adalah daya saing, kalau kita lihat hanya Prancis yang miliki daya saing pertahanan yang besar. Saat ini mereka adalah eksportir senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Secara *value* nilai produksi

pertahanan mereka meningkat terus dalam dekade terakhir. Dan, beberapa industri pertahanan mereka *over performing* ya, sehingga dari daftar SIPRI itu punya daftar 100 besar industri pertahanan terbesar dunia. Industri Prancis itu yang masuk ke dalam SIPRI itu berkurang dari 6 menjadi 5. Adapun Brazil dan Uni Emirat Arab sempat masuk daftar yang sama tapi per 2022 tidak ada lagi industrinya yang cukup kompetitif untuk berada di daftar SIPRI. Secara *value* nilai produksi senjata Brazil meningkat sedikit, adapun UEA itu tidak konsisten dalam nilai produksi senjata, kadang bisa besar kemudian dia hilang.

*Trend* ekspor dan impor senjata dengan Indonesia, Brazil dan Prancis menjadi penyuplai alutsista untuk Indonesia. Nilai ekspor alutsista Prancis ke Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah hampir setengah miliar Dolar. Pada saat ini Indonesia memiliki 21 jenis alutsista yang berasal dari Prancis, artinya ketergantungan kita untuk *maintenance* alutsista tersebut sangat tinggi. Bayangkan kalau nanti tiba-tiba kita diembargo ini akan repot daripada kita diembargo terhadap alutsista dari Rusia. Sedangkan, Indonesia memiliki dua jenis alutsista yang berasal dari Brazil. UEA belum mencatat ekspor, tapi sebaliknya Indonesia mencatat ekspor kepada UEA senilai 63 juta Dolar untuk CN 235. Dan, pada tahun lalu Indonesia berhasil menekan kerja sama kontrak penjualan LPD produksi PT PAL. Jadi, di sini kita bisa lihat Prancis dan Brazil adalah *supplier* kita sedangkan UEA adalah pasar kita.

Bagaimana dengan stabilitas politik dan integritas sektor pertahanan. Ini sangat penting Bapak dan Ibu, stabilitas politik ini berarti kelanggengan kerja sama kita dengan mereka. Integritas pertahanan ini artinya seberapa bisa kita percaya pada praktik-praktik, baik dari negara-negara yang keempat tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa indeks negara rapuh berdasarkan dari *fund for peace* yang diukur berdasarkan 4 indikator besar kohesi, ekonomi, politik, dan sosial. Serta indikator lintas sektor ini menunjukkan Brazil dan Kamboja itu rentan secara politik, sedangkan Prancis dan UEA ini cukup stabil. Jadi, kita harus waspada dengan Brazil dan Kamboja ke depannya.

Untuk integritas pertahanan, Prancis dan Brazil termasuk yang berintegritas tinggi. Mereka masuk ke dalam penilaian *transparency interntional band*-nya C yang mana itu lebih baik daripada Indonesia *band*-nya D ya, dan juga lebih bagus daripada UEA yang *band*-nya E. UEA dianggap tidak punya komitmen kuat terhadap anti korupsi atau anti suap, ini berarti UEA harus kita waspadai ke depannya.

Ini analisis kami terhadap enam..., maaf tujuh ya, dari karakter ekonomi pertahanan. Idealnya kita bekerja sama dengan negara yang hijaunya paling banyak, ini tidak bermaksud untuk mendiskriminasi apa namanya partai yang warnanya merah, tapi di sini merah saya maksudkan apa bahwa ini yang buruk. Jadi kalau kita mau kerja sama, kerja samalah dengan yang hijaunya paling banyak dan merahnya paling sedikit. Tapi kalau memang kita harus kerja sama maka kita harus waspadai yang merahnya ini, harus di mitigasi seperti apa. Misalnya tadi UEA itu merah di integritas pertahanan, bagaimana mitigasinya, transparansi, akuntabilitas *gitu* ya.

Sedangkan Prancis, Brazil itu merahnya ada di akses impor kita terhadap pasar pertahanannya mereka. Kalau mereka tidak membuka pasar apa kita mau terus-terusan jadi konsumen saja *gitu* ya. Atau bagaimana cara kita mengubah status kita dari konsumen menjadi mitra, bukan lagi hanya konsumen belaka.

Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ini adalah lini masa, ini mohon maaf nanti bisa dibaca saja. Saya akan langsung saja demi menghemat waktu ke perbandingan DCA. DCA ini menunjukkan pertemuan antara kepentingan kita dengan kepentingan negara mitra tentunya. Dan, di sini bisa dilihat bahwa kita bisa membagi lingkup kerja sama itu ke dalam 5 intelijen, industri pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, serta perdamaian, dan kemanusiaan. Di sini bisa lihat juga bentuk kerja sama, dialog, pertukaran kunjungan, serta latihan. Dan, di sini Prancis adalah negara yang paling luas cakupan kerja samanya dengan kita ya di dalam DCA.

Kemudian, Brazil ini lebih fokus kepada industri pertahanan, Iptek, dan pendidikan dan pelatihan. Kamboja itu kurang dari segi cakupan perdamaian dan kemanusiaan ya, padahal ini ada potensi yang besar kita bisa bekerja sama dengan Kamboja untuk HADR (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief*), serta hal-hal lain mungkin seperti *cyber security*, ya. Kemudian UEA ini fokusnya kepada Iptek Inhan, dan pendidikan, serta latihan padahal kita juga butuh untuk misalnya kerja sama intelijen, ya, untuk *counter terrorism* dan juga untuk Inhan agar kita bisa membuka potensi kerja sama produksi dan pengembangan bersama dengan UEA.

Ini saya agak lompat mungkin nanti *slide-slide* yang sebelumnya bisa ditanyakan, dibahas ketika tanya jawab jika diperlukan. Kesimpulan dan rekomendasi saya adalah sebagai berikut.

DCA ditandatangani dengan Brazil dan Kamboja di Tahun 2017, dan UEA Tahun 2020, dan Prancis Tahun 2021 namun ratifikasinya di saat yang bersamaan. Dibutuhkan evaluasi agar proses ratifikasi terjadi lebih cepat, beberapa kerja sama bilateral pertahanan misalnya Indonesia-Prancis ini sudah sangat dalam, sehingga perlu pengamanan secara legal atau hukum.

Kedua, naskah kebijakan akademik..., naskah akademik mohon maaf yang disampaikan kepada kami tidak cukup mengulas kedalaman hubungan pertahanan, perlu lebih banyak data terkait ekspor impor dan aktivitas kerja sama yang sudah dilakukan, serta untung dan ruginya. DPR harus mengaktifkan fungsi pengawasan kerja sama pertahanan dan membangun pangkalan data yang dibutuhkan. DCA berlaku setiap sampai 5 tahun dan kemudian otomatis diperpanjang, apakah pernah ada misalnya DCA yang kemudian di-*stop gitu* ya, karena tidak menguntungkan atau malah merugikan, ini saya rasa pentingnya ada pangkalan data di DPR.

Ketiga, DCA dengan Prancis perlu dilakukan cepat mengingat dependensi alutsiata kita terhadap Prancis itu sangat besar dan potensi kerja sama pertahanan terutama terkait dengan *offset*, alih teknologi, lisensi

produksi, dan sebagainya dari impor alutsista. DCA dengan UEA perlu diawasi karena kondisi ekonomi pertahanan mereka yang tidak stabil dan indeks integritas pertahanan yang rendah, namun tetap perlu eksplorasi kesempatan ekspor dan kerja sama bagi Indonesia. DCA dengan Brazil diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dukungan dua alutsista yang kita punya. Penekanan implementasi DCA dengan ketiga negara akan cenderung pada kerja sama industri pertahanan, sehingga dibutuhkan strategi khusus agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen namun naik kelas menjadi mitra. Perlu eksplorasi kemungkinan UEA melakukan investasi pada industri pertahanan Indonesia, tapi ini mungkin satu forum tersendiri ya untuk bisa melakukannya karena UEA amat sangat tertutup data-datanya sulit didapatkan.

Yang keempat, DCA dengan Kamboja perlu diperlakukan secara khusus disebabkan statusnya sebagai Anggota Asean dengan kecenderungan *bandwagoning* kepada Tiongkok. Apakah Indonesia kemungkinan akan bisa menggunakan diplomasi pertahanan sebagai penyeimbang pengaruh Tiongkok di Kamboja dan menetralkan negara tersebut. *Nah*, ini merupakan satu agenda penting yang perlu kita pikirkan ke depannya bersama.

Saya akan berhenti sampai di sini, terima kasih atas kesempatannya.

*Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

*Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Ibu Curie Maharani Savitri, Ph.D.

Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Ketua Komisi I, yang baru tiba. Selanjutnya, terima kasih juga atas paparan tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Angel, Pak Muhamad Haripin, dan Ibu Curie.

Kami beri kesempatan kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi I untuk menyampaikan pendalamannya. Di meja Pimpinan sudah mendaftarkan diri Bapak TB. Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan pendalamannya.

Silakan pada, Pak TB.

**F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Terima kasih.

**Para narasumber yang saya hormati dan saya banggakan,  
Rekan-rekan yang saya hormati,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang pertama, yang tadi sampaikan oleh Profesor Damayanti. Sebetulnya kalau kita berbicara soal pertahanan maka kita akan tidak bisa lepas dari esensi ancaman atau hakekat ancaman. Kalau yang dipaparkan oleh Ibu, sepertinya ancaman itu hanya militer saja begitu ya ada 4 poin itu. Padahal kalau menurut PBB dalam hal ini dewan keamanan itu kalau tidak salah ada enam, yang pertama militer, termasuk di dalamnya itu adalah kelaparan, kemudian penyakit, kemudian juga lingkungan hidup, dan kemudian juga pekerjaan publik, dan yang terakhir itu adalah perubahan iklim sekarang ini, tapi memang yang pertama itu adalah militer. Baik, itu nanti membuat pengayaan kami lebih banyak terutama masalah-masalah militer.

Berikutnya, sebetulnya saya lebih senang menyebutnya sebagai kerja sama pertahanan, supaya tidak *bias* dengan pakta pertahanan. Kalau pakta pertahanan menurut Undang-Undang Dasar saja kita tidak boleh dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi soal pertahanan atau pandangan filsafah bangsa ini dalam hal perang, ya, kita harus bedakan, tapi ini lebih banyak yang pertama pada masalah diplomasi pertahanan. Kadang-kadang kita juga misalnya kerja sama pertahanan dengan Bulgaria, sampai hari ini tidak pernah juga ada kegiatan setelah ditandatangani perjanjian itu ya. Jadi, lebih banyak kepada diplomasi terutama tukar menukar para prajurit untuk berlatih.

Kemudian yang kedua, sekarang ini ya diplomasi tentang persenjataan. Terutama pada saat terjadi adanya ada perang dingin, maka berebut untuk mendapatkan suku cadang, *sparepart* yang tidak diperlukan sehingga beli di pasar umum dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting ke depan ini seperti yang dipaparkan oleh Ibu yang terakhir itu, memang benar ya, Ibu Puri, Ibu Cori, Ibu Curie ya, itu memang ada wilayah-wilayah memang lebih banyak kepada masalah-masalah ekonomi pertahanan kerja sama, begitu, kerja sama. Tapi kita memang harus jauhi dari kerja sama itu terlibat dalam hal terjadinya katakanlah menuju ke arah pakta pertahanan, karena kembali lagi pakta pertahanan jelas tidak dibenarkan. Yang konon sekarang saja sedang menjadi ramai seolah-olah Indonesia menyewakan satu pulau untuk dipakai berlatih oleh Singapore, itu tidak benar sama sekali.

Dalam DCA yang dilakukan itu ya memang ada kaitannya misalnya dengan kegiatan-kegiatan lain, tetapi prinsipnya hanya dua kerja sama latihan atau latihan bersama begitu, ya. Itu sehingga menurut hemat kami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu cukup relevan dan nanti akan menjadi bahan kami untuk membuat keputusan menyetujui atau tidak menyetujui dibuatnya sebuah draf perjanjian pertahanan, kerja sama pertahanan.

Terima kasih, saya kira itu saja.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

*Waalikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Jenderal TB. Hasanuddin.

Selanjutnya, ada Bapak atau Ibu lain yang ingin menyampaikan pedalaman. Dari sisi kiri tidak ada, ada sisi kanan tidak ada, Ibu Ketua. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada masing-masing Profesor Angel, dan Pak Muhamad Haripin, serta Ibu Curie untuk menyampaikan tanggapannya. Saya kira karena juga tadi tidak terlalu panjang, mohon tidak lebih dari 5 menit masing-masing.

Terima kasih.

**GURU BESAR ILMU KEAMANAN INTERNASIONAL UKI (Prof. ANGEL DAMAYANTI, Ph.D.):**

Baik, mungkin saya izin terlebih dulu Mbak Curie, Mas Arifin. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua, Bapak-Ibu Pimpinan, dan Bapak-Ibu Dewan kehormatan.

Pak TB. Hasanuddin, Pak Jenderal mohon izin, tadi memang saya sudah jelaskan. Mas, boleh tolong dinyalain *nggak* ya *slide*-nya. Bicara tentang ancaman itu memang kita sedang menghadapi ancaman tradisional dan non tradisional betul ya, Pak, ya yang tadi Bapak sampaikan dan tadi saya juga sudah jelaskan. Artinya harapannya kerja sama pertahanan itu memang bisa untuk menghadapi ancaman yang multidimensi tadi *gitu* ya. Dan, ya tadi yang seperti saya sampaikan dan Bapak juga nanti bisa melihat juga draf atau berdasarkan naskah akademik ini memang penguatannya kesannya memang sangat di militer, gitu jadi, mungkin nanti bisa juga dipertanyakan misalnya alutsista yang seperti tadi saya sampaikan ya, yang misalnya dia bisa untuk mengawasi atau menjaga keamanan laut, sekaligus juga misalnya mengawasi jangan sampai ada pencurian ikan atau apa kapal fregat atau kapal tempur yang juga memang sekalian bisa untuk mengawasi perairan dan udara *gitu*. Jadi yang *multi purposes* itu yang diharapkan kalau nanti misalnya mau dialami.

Dan, betul sekali Pak Jenderal, ancaman ini ya *sorry...*, ancaman non tradisional itu hari ini justru jauh lebih banyak jumlahnya daripada ancaman militer yang kita hadapi, yang seperti ini tadi. Dan ini memang, *oh* satu poin lagi kalau kita mau bahas satu per satu sebenarnya di dalam catatan saya. Yang membahas misalnya kerja sama pertahanan, *sorry* kerja sama untuk menghadapi ancaman terorisme itu, seingat saya itu hanya ada di Prancis atau kalau *nggak* salah Prancis, karena Prancis yang paling lengkap ya.

*Nah*, kerja sama penanganan terorisme ini kan kalau di Indonesia itu misalnya yang harusnya menjadi koordinat..., yang mengkoordinir itu misalnya BNPT *gitu* ya, tapi di dalam pencegahannya misalnya melibatkan juga Kementerian Pendidikan mungkin, atau Kementerian Agama, atau Kepolisian jelas ada Densus, dan mungkin juga sedikit banyak melibatkan Kementerian Pertahanan TNI terutama untuk yang operasi militer selain perang.

*Nah*, di dalam RUU-nya itu belum ada misalnya pembahasan tentang bagaimana mekanisme pengawasan atau pelaksanaan kerja untuk yang penanganan terorisme. Karena kalau yang militer jelas *lah* itu kan ranahnya TNI atau Kementerian Pertahanan, tapi yang nirmiliter tadi yang non tradisional tadi yang ancumannya seperti ini, di Indonesia *tuh* sudah ada badan-badan koordinasinya sendiri masing-masing ya tadi, yang terorisme misalnya ada di BNPT. *Nah*, bagaimana kemudian penanganan atau pembagian mekanisme kerja di antara *stakeholder* yang terkait itu belum, belum terlihat *tuh* di dalam draf RUU-nya. Kalau misalnya nanti Pak Jenderal berkenan juga menggali lebih dalam ya ke teman-teman Kemhan misalnya bagaimana mengantisipasi pembagian khususnya untuk ancaman-ancaman yang non tradisional ini.

Begitu, Pak Jenderal, terima kasih.

**F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Boleh dilanjutkan kita diskusi.

Inilah yang menjadi problem di kita, di Indonesia. Teroris itu kalau di luar negeri itu ada tahapannya yang diselesaikan oleh Polisi, kemudian ketika tahap penghancuran itu bisa saja oleh Polisi maupun oleh militer. Terutama misalnya kalau teroris itu berada di luar benua atau luar wilayah, contohnya ketika pasukan Amerika, pasukan khusus Amerika menghancurkan teroris di wilayah Pakistan, waktu itu teroris yang terkenal itu ya. Itu bisa dilakukan tetapi kalau di Indonesia sampai sekarang ya perpresnya itu belum dikeluarkan, belum ditandatangani tentang pelibatan TNI dalam hal pemberantasan teroris begitu ya. Baru sampai tahap di BNPT itu adalah tahap pertukaran data intelijen saja, begitu. Kalau untuk patroli bersama betul ya terutama di wilayah-wilayah perbatasan, misalnya Filipina dengan Indonesia, itu ada patroli perbatasan. Tetapi harus ada payung hukumnya dulu antara MoU, antara Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri di sana. Setelah secara teknis baru dilaksanakan oleh militer barulah dasar hukumnya adalah perjanjian atau kerja sama pertahanan itu.

Terima kasih, Ibu.

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

Baik, terima kasih, Pak Jenderal TB. Hasanuddin.

Selanjutnya, ada tambahan dari Pak Muhamad Haripin.

**KAJIAN KEAMANAN DAN KONFLIK DI PUSAT PENELITIAN POLITIK  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL/BRIN (MUHAMAD HARIPIN,  
Ph.D.):**

Mungkin izin, Pimpinan, sedikit saja di apa..., kurang dari 5 menit, jadi ingin menanggapi yang disebutkan oleh Pak TB. Dan, ya mungkin sambil

berbagi apa riset yang sedang kami lakukan juga. Jadi memang salah satu problem yang kami temui dalam studi tentang diplomasi pertahanan dalam pangkalan data yang kami buat, tadi persis yang disebutkan Pak TB ya tentang *follow up* itu Bapak-Ibu sekalian.

Jadi memang ketika satu perjanjian, ketika suatu pertemuan, atau mungkin satu dialog begitu dalam forum bilateral maupun multilateral. Kemudian juga kita ketahui bahwa ada kesepakatan a, b, c, d tapi kalau kita coba lacak lagi 6 bulan atau bahkan setahun kemudian ternyata belum ada *follow up*-nya begitu. Jadi, berarti kan hanya berakhir di bibir saja begitu ya mungkin ya. Jadi, itu memang satu yang kami temukan juga dari apa pernyataan Pak TB tadi, betul sekali.

Kemudian yang kedua, *nah* ini mungkin lebih bersifat *counter intuitive* ya. Kalau tadi Mbak Curie bilang bahwa misalkan kita dalam konteks kita Prancis, di mana intensitas interaksinya tinggi tapi tidak dalam kerangka legal begitu, Mbak, ya kalau yang tadi. Tapi juga kita melihat juga bahwa sebetulnya Interaksi yang tinggi juga itu tidak selalu diikuti oleh keluaran yang tinggi juga *gitu*. Jadi ya lebih, ya jadi lebih banyak apa ya *talkshop* lah begitu ya *ngobrol-ngobrol*. Jadi, memang itu juga tadi makanya saya sampaikan juga kita perlu mungkin dari DPR begitu ya buat DPR, bahwa ketika ada satu perjanjian, ketika ada satu komitmen bersama pada level bilateral maupun multilateral dilakukan oleh eksekutif, mungkin DPR bisa menanyakan begitu kepada eksekutif bagaimana *follow up*-nya dan sebagainya. Karena interaksi tinggi juga yang apa tapi ada juga interaksi tinggi keluaran tinggi, tapi ada juga yang memang keluarannya justru rendah begitu. Jadi demikian.

Terima kasih banyak, Pimpinan, mohon maaf kalau lebih dari 5 menit.

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

Terima kasih, Pak Muhamad Haripin.

Dari Ibu Curie Maharani, Ph.D., silakan.

**DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS BINUS (CURIE MAHARANI SAVITRI, Ph.D.):**

Terima kasih, Pak TB, atas masukannya.

Kami di Binus itu mengembangkan pangkalan data untuk kerja sama terkait dengan industri pertahanan. Dan, ini kami lakukan karena sebenarnya kita punya forum bilateral yang sudah panjang dari Tahun 2010-an ya, Pak, ya dari zaman Pak Purnomo ya sampai sekarang, tapi memang akses ini menjadi masalah akhir-akhir ini begitu ya. Jadi, ada lebih banyak hambatan untuk mengakses misalnya seperti protokol, karena kan kami harus melihat cakupan kerja sama itu lewat protokolnya, kalau DCA saja kan *nggak* bisa *gitu* ya. Implementasinya itukan ada di protokol apa saja yang disepakati.

Kemudian juga, kami hendak misalnya mengkontraskan antara permasalahan yang ada dengan kesepakatan yang diraih. Apakah memang sudah menyelesaikan masalah itu ya, itu juga memang sulit dilihat. Mungkin dari DPR bisa memfasilitasi nantinya upaya-upaya evaluasi ini dengan melibatkan lembaga penelitian seperti BRIN, kemudian kami yang dari akademisi *gitu* ya, untuk bisa mendapatkan akses ke Kementerian Pertahanan. Karena kalau tidak dievaluasi ini kan kita bicara mengenai performa pemerintah yang dibiayai oleh rakyat. Dan, hal yang lainnya lagi kalau tidak dievaluasi, maka dukungan untuk anggaran kepada militer, kepada sektor pertahanan juga kemungkinan besar akan selalu dipertanyakan oleh Masyarakat, karena mana performanya *gitu* kan, mana evaluasinya.

Jadi, ini yang mungkin saya titipkan kepada Bapak dan Ibu, untuk kedepannya membantu kami untuk bisa mengakses bahan-bahan yang dibutuhkan, baik untuk internal Kemhan maupun keperluan DPR untuk melakukan *oversize*.

Sebagai akademisi dan peneliti saya rasa masalah kerahasiaan sudah..., harusnya tidak menjadi masalah karena sejak zaman Pak SBY, kami juga sudah dilibatkan *gitu* ya. Apabila misalnya harus melakukan tanda tangan *nondescription agreement* juga tidak masalah *gitu* ya, tapi kita butuh untuk mengevaluasi agar benar-benar kita pahami mana sih yang efektif, mana yang tidak *gitu* ya.

DCA ini memang tidak bisa jadi satu indikator performa Kementerian Pertahanan, karena memang tujuan kita membuat DCA sebanyak-banyaknya agar kita dilihat bertetangga baik, punya banyak teman *gitu* kan. Tapi apakah itu kemudian melayani kepentingan kita yang lain itu kan, ya itu status yang baik, reputasi yang baik di mata internasional itu satu hal. Tapi apakah itu kemudian menyelesaikan masalah kita, seperti tadi yang saya apa sampaikan masalah dengan alutsista kita yang tua, yang *diversified gitu* ya, yang tidak bisa *interoperability*, susah itu satu hal yang harus kita ukur secara tersendiri juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):**

Iya, terima kasih, Ibu.

Begini, kami ini kan ratifikasi yang kadang-kadang ya terlepas dari siapapunlah itu presidennya atau Menteri Luar Negerinya. Kadang-kadang setelah perjanjian ditandatangani diratifikasi ke DPR, padahal kami tidak pernah terlibat langsung pasal-pasal isinya begitu. Sehingga kadang-kadang ya sudah kami setuju saja ya, tetapi tentu dalam pelaksanaannya dengan catatan.

Yang kedua, ada juga yang menolak, ditolak langsung misalnya pertukaran DCA dengan Singapura itu dengan masalah pertukaran ya,

pertukaran koruptor, itu. Itu juga kan banyak ini masalah pertahanan *kok* ditukar dengan masalah-masalah seperti ini, sehingga banyak reaksi dari masyarakat kalau kami menyetujui, ya, banyak reaksi dari masyarakat yang kritis dan itu harus kami mendengarkannya *gitu*.

Tetapi juga..., banyak juga yang harus kami ratifikasi dengan secepatnya karena hanya berdasarkan untuk kepentingan diplomasi. Misalnya saja zaman dulu kami harus, ya, meratifikasi kerja sama pertahanan dengan Rusia, karena supaya kita tidak dianggap berat sebelah terlalu dekat ke Rusia. Sekarang yang sedang ramai adalah ke Amerika dan Cina begitu, sehingga ya Cina haruslah ya kita ratifikasi juga, ke Amerika juga harus, supaya tidak timbul kecurigaan dari mereka, bahwa kita tidak benar-benar non-blok. Walaupun dalam pelaksanaannya istilah non-blok itu juga tidak sesulit yang dikira.

Saya kira itu saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGIONO/F-P. GERINDRA):**

Baik, terima kasih.

Terima kasih, kami ucapkan kepada para narasumber atas semua penjelasan yang telah disampaikan juga pedalaman yang telah dilakukan oleh tadi Bapak Jenderal TB. Hasanuddin, selaku Anggota Komisi I dari Fraksi Partai PDI Perjuangan.

Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, hasil dari RDPU pada sore hari ini akan menjadi masukan bagi Komisi I dalam rangka melakukan pembahasan terhadap keempat RUU yang nantinya akan kita sahkan di bidang pertahanan di Komisi I, ini.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Dengan Pendapat Umum antara Komisi I dengan narasumber yang pada sore hari ini hadir Profesor Angel Damayanti, Ph.D., Bapak Muhamad Haripin, Ph.D., dan Ibu Curie Maharani Savitri, Ph.D., telah dapat kita lakukan dengan baik.

Dan dari meja pimpinan kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang berpuasa dapat melanjutkan ibadah puasanya dengan baik sampai nanti berbuka dan kita semua diberi kesehatan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Selanjutnya dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabil'alamin*, rapat pada sore hari ini kami nyatakan ditutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera,  
Selamat sore bagi kita sekalian,  
*Shalom,*  
*Om santi santi santi om,*

*Namo buddhaya,*

Terima kasih.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.59 WIB)**

**Jakarta, 26 Maret 2024  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si.  
NIP.196808111996031001**